

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Periode 2018-2022

Alif'ia Nabila Fitri^{a,1*}, Laura Prisca^{a2}, Jamil KMS M Thoriq^{a3}

^aPoliteknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*henny.yulsiati@polsri.ac.id

*korespondensi

Received: 07 Januari 2024; Revised: 12 Maret 2024; Accepted: 29 April 2024

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan untuk mengukur kemandirian dan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2018-2022 yang diukur dari menggunakan Teknik Analisis Trend, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan dan Rasio Efektivitas PAD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan Teknik Analisis Trend, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan dan Rasio Efektivitas PAD kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dikatakan masih kurang baik dikarenakan pendapatan transfer yang masih mendominasi dari pada penerimaan pendapatan serta peningkatan ekonomi maupun, pendapatan asli daerah sangat berpengaruh pada kemandirian dari keuangan daerah secara signifikan pada tahun 2018-2022.

Kata kunci: *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah; Kemampuan Keuangan Daerah; Efektivitas PAD; Pertumbuhan Ekonomi*

Abstract

This research aims to analyze financial performance to measure independence and its influence on economic growth on regencies/cities in Aceh Province for the 2018-2022 period as measured using Trend Analysis Techniques, Debt to Regional Original Income Ratio, Level of Monetary Decentralization Proportion, Monetary Freedom Proportion District, Reliance Proportion and Cushion Viability Proportion. The information utilized in this exploration is documentation and optional information as Spending plan Acknowledgment Reports in the Aceh Territory Local Government Monetary Report Review Results Report for 2018 - 2022.

Keywords: Local Government Financial Performance; Regional Financial Independence; Regional Financial Capability; The effectiveness of PAD; Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan keuangan merupakan suatu proses perubahan keadaan perbaikan moneter suatu negara secara terus-menerus menuju kondisi yang unggul dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan pendapatan dipandang bermanfaat jika melampaui laju tahun lalu; sebaliknya, ketidakhadirannya dipandang merugikan pada waktu tertentu melainkan menurun. Perkembangan keuangan yang tinggi dan wajar merupakan prasyarat utama untuk melanjutkan pergerakan moneter dan memperluas bantuan pemerintah. Bagaimanapun, perkembangan moneter di Aceh masih terombang-ambing. Dapat diartikan bahwa beberapa nilai pembangunan keuangan telah berkurang serta terdapat juga yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan daerah Aceh saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan hal ini mungkin disebabkan oleh laju pemekaran daerah yang tidak menentu.. (Sari, Sari, Anwar, & Usman, 2022).

Tabel 1. 1

Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah
Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Selisih
2018	Rp 2.359.385.393.645,65	Rp 12.065.901.692.555,00	-Rp 9.706.516.298.909,35
2019	Rp 2.698.912.471.144,15	Rp 13.049.675.124.487,00	-Rp 10.350.762.653.342,80
2020	Rp 2.570.775.877.183,15	Rp 11.826.017.687.067,00	-Rp 9.255.241.809.883,85
2021	Rp 2.505.887.909.031,12	Rp 11.431.169.265.498,00	-Rp 8.925.281.356.466,88
2022	Rp 2.917.145.003.051,96	Rp 10.775.168.990.686,00	-Rp 7.858.023.987.635,04

Peningkatan kebebasan moneter dan kemandirian provinsi selama tahun 2018 - 2022 masyarakat daerah dan perkotaan di wilayah Aceh semakin membaik, namun pendapatan yang diperoleh dari penyesuaian aset atau pemindahan aset dari pemerintah Pemerintah federal terus melampaui pendapatan dasar di wilayah tersebut. Batasan moneter di daerah dan masyarakat perkotaan di wilayah Aceh saat ini berada pada rentang yang tidak menguntungkan. Batasan moneter yang cukup buruk menyebabkan kebebasan moneter masyarakat daerah dan perkotaan di wilayah Aceh

masih terbilang rendah. Menurut peneliti pendahulu yang menganalisis pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kapasitas fiskal dan otonomi daerah berdampak pada kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan. (Royda & Riana, 2019) membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan secara signifikan mempengaruhi perkembangan moneter. Hal yang setara berlaku untuk riset saat diarahkan oleh (Sirestu, 2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Dampak Keuangan Daerah dan Kompetensi Daerah Terhadap Perekonomian Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011–2022” bahwa Ekspansi perekonomian dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh otonomi moneter daerah.. (Stannia dan Asmara ; 2014).

METODE

PENELITIAN

Metode ini menerapkan kontrol kualitas atau metode kuantitatif adalah metode saat dipakai pada menyelidiki populasi maupun sampel, mengumpulkan informasi dengan alat riset, dan memeriksa data numerik dan statistik, Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi akar informasi tambahan pada riset ialah kabupaten/kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018-2022 yang diperoleh melalui situs e-ppid.bpk.go.id, Data Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera dan Data Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun 2018-2022 didapat di www.aceh.bps.go.id.

Populasi dan Sampel

LKP Provinsi Aceh adalah populasi pada riset ini yang sudah dilakukan pemeriksaan (Audit) oleh BPK tahun 2018-2022 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPKRI).

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan atau kualitas yang digerakkan suatu populasi. (Sugiyono 2008:118). Contoh Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Aceh digunakan dalam penyelidikan ini Tahun 2018-2022.

Teknik Analisis Data

Analisa data atau pemeriksaan informasi merupakan bagian penting, karena investigasi informasi sangat penting dalam menentukan pencapaian target pemeriksaan suatu penelitian.

Analisis Trend

Beberapa langkah untuk melakukan analisis trend adalah sebagai berikut :

- a. Mentabulasi data pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari LRA Provinsi Sumatera Selatan
- b. Membuat grafik untuk melihat kecenderungan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- c. Mencari pola yang mungkin terjadi dari pola yang dapat diverifikasi dalam ringkasan fiskal yang diperiksa.
- d. Menentukan tujuan atau pilihan sehubungan dengan cara menebak pola yang diverifikasi.

Rasio Utang terhadap PAD

Rasio utang terhadap PAD dikenal dengan istilah rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan pemerintah dalam melunasi utangnya dengan menggunakan

pendapatan daerah dapat dinilai dengan menggunakan rasio ini. Proporsi ini lebih baik jika mempunyai nilai yang layak dengan asumsi mempunyai nilai yang rendah (Mahmudi, 2019). Untuk menghitung kewajiban proporsi Bantalan berdasarkan setiap tahun rencana keuangan menggunakan:

Derajat Desentralisasi

Menganalisis derajat desentralisasi dapat dilaksanakan pada teknik demikian:

- Mengumpulkan informasi realisasi PAD dan total pendapatan LRA, mengklasifikasikannya, dan menampilkan Provinsi Sumatera Selatan pada 2017-2021.
- Menentukan derajat desentralisasi berdasarkan masing-masing tahun anggaran dengan formulasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- Menentukan tingkat derajat desentralisasi dengan mengacu pada:

Tabel 3.1
Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

- Menentukan derajat desentralisasi yang sudah dihasilkan.

Kemandirian Keuangan

Langkah-langkah untuk mengurangi proporsi kebebasan dilakukan sebagai berikut

- Mengumpulkan, mengenal dan mengatur informasi dan memindahkan informasi pengakuan pembayaran dari LRA Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
- Hitung proporsi kebebasan setiap tahun moneter dengan rincian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

- Memutuskan desain hubungan dengan kapasitas provinsi (menurut sudut pandang moneter) dengan memperhatikan proporsi kebebasan yang diarahkan menurut:

Tabel 3.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Sangat Rendah	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konstruktif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2002:189)

- d. Memeriksa rasio independensi yang dihitung.

Rasio Ketergantungan

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghasilkan rasio ketergantungan, sebagai berikut:

- Mengumpulkan, mengenali, dan mengatur informasi pendapatan transfer maupun total pendapatan dari LRA Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021.
- Menjumlahkan rasio ketergantungan untuk setiap tahun anggaran. Teknik rasio ketergantungan ialah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

- c. Tabel berikut menunjukkan bagaimana menentukan persyaratan ketergantungan keuangan daerah:

Tabel 3.3
Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan
0%-25%	Sangat Rendah
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

- d. Mengenali rasio ketergantungan yang telah data maupun dijumlahkan.

Rasio Efektivitas PAD

Prosedur berikut digunakan untuk menghitung rasio efektivitas:

- Kumpulkan informasi dari LRA mengenai anggaran, identifikasi, dan tabulasikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
- Menjumlahkan rasio efektivitas PAD sesuai dengan tahun anggarannya. Menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Menilai efektivitas PAD sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.4
Efektivitas Keuangan Daerah

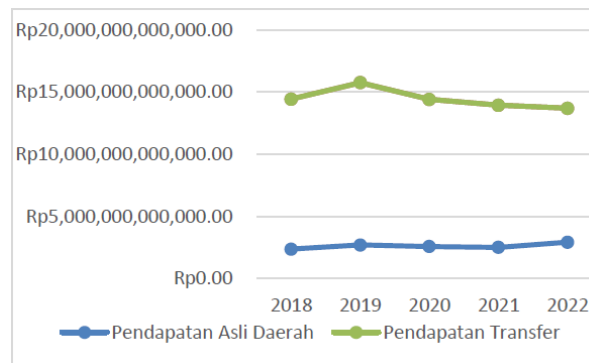
Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2010:142)

d. Analisis rasio efektivitas PAD yang telah dihitung.

PEMBAHASAN

Analisis Trend



Gambar 4.1

Grafik Analisis Trend Pendapatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2022

Berdasar gambar 4.1 grafik pada pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pada akun PAD mencapai Rp2.359.385.393.645,65 kemudian pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar Rp2.698.912.471.144,15, kemudian pada periode 2020 dan 2021 mulai menurun hingga mencapai Rp2.505.887.909.031,12. Kemudian pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah terjadi lagi kenaikan Rp2.917.145.003.051,96. Sedangkan pada akun pendapatan transfer pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp13.049.675.124.487,00, namun kenaikan ini tidak bertahan cukup lama karena secara berturut-turut untuk tahun 2020 sampai 2022 pada akun pendapatan transfer mengalami penurunan hingga mencapai Rp10.775.168.990.686,00. Hal tersebut melihatkan kecenderungan hasil keuangan pada Kabupaten maupun Kota di Provinsi Aceh cenderung menurun akibat PAD lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer

Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.1

Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD

Tahun	Total Utang	Total PAD	Rasio Utang terhadap PAD
2018	Rp.3,379,737,047,419.80	Rp2.359.385.393.645,65	143%
2019	Rp.2.745.018.328.614,29	Rp2.698.912.471.144,15	102%
2020	Rp.3.037.487.998.856,06	Rp2.570.775.877.183,15	118%
2021	Rp.519.675.649.403,62	Rp2.505.887.909.031,12	21%
2022	Rp.595.981.306.943.91	Rp2.917.145.003.051,96	20%

Berdasarkan data pada table 4.1 diatas menunjukkan perhitungan bahwa Utang PAD relative menurun dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mencapai skala lebih dari 100%, Besarnya skala menunjukan bahwa utang daerah lebih besar dari pendapatan asli daerahnya sendiri, Pada Tahun 2019 juga utang daerah lebih besar dari PAD nya, Namun di tahun ini sedikit lebih menurun, Pada Tahun 2020 Utang Daerah Kembali Meningkatkan Menjadi 118%, Pada Tahun 2021 Terjadi kemajuan Pada Daerah Aceh yaitu Utang Daerah Menurun dari 100% menjadi hanya 21% dan pada 2022 terus menurun hingga hanya sebesar 20%, tentunya menunjukkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mampu mengupayakan agar membayarkan Utang Daerah sehingga menghasilkan skala sangat rendah dari sebelumnya.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 4.2

Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Jumlah Pendapatan Daerah	Rasio DDF	Keterangan
2018	Rp2.359.385.393.645,65	Rp14.427.783.075.798,60	16%	Kurang
2019	Rp2.698.912.471.144,15	Rp15.752.800.901.652,10	17%	Kurang
2020	Rp2.570.775.877.183,15	Rp14.439.920.557.021,10	18%	Kurang
2021	Rp2.505.887.909.031,12	Rp13.948.388.273.436,10	18%	Kurang
2022	Rp2.917.145.003.051,96	Rp13.713.584.703.595,90	21%	Sedang

Melihat proporsi di atas, dapat diasumsikan bahwa kondisi normal bagi masyarakat daerah dan perkotaan di Wilayah Aceh masih berada pada skala rendah. Pemerintah Aceh sebenarnya mengimbangi administrasi moneter yang belum otonom secara moneter, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jadi variabel penyebab maraknya persoalan perbaikan Aceh. Kurangnya kegiatan produktif di provinsi Aceh merupakan penyebab buruknya perolehan PAD. Hal

ini disebabkan PAD kabupaten serta kota Provinsi Aceh masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Jadi dukungan terhadap pelaksanaan dan kemajuan pemerintah sebagian besar masih bergantung pada sumber pendanaan, awalnya dari lembaga pemerintah. Selain itu, Pemerintah Aceh belum siap mengkaji kemungkinan daerah tersebut sebagai sumber pendapatan daerah provinsi dan tidak merencanakan secara ideal jenis aset keuangan dan kemampuan obyek Bantal sebagai penggerak daerah menjadi kualitas dan intensitas kewilayahan. (keterampilan pusat).. (Arispen & Rahmi, 2021).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Keterangan
2018	Rp2.359.385.393.645,65	Rp12.065.901.692.555,00	20%	Kurang/ Instrukturif
2019	Rp2.698.912.471.144,15	Rp13.049.675.124.487,00	21%	Sedang/Instrukturif
2020	Rp2.570.775.877.183,15	Rp11.826.017.687.067,00	22%	Sedang/Instrukturif
2021	Rp2.505.887.909.031,12	Rp11.431.169.265.498,00	22%	Sedang/Instrukturif
2022	Rp2.917.145.003.051,96	Rp10.775.168.990.686,00	27%	Sedang/Konsultatif

Berdasarkan gambaran dan perkiraan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa proporsi otonomi moneter provinsi bagi masyarakat lokal dan perkotaan di wilayah Aceh selama beberapa tahun terakhir masih berada pada kelas menengah, karena masih dalam rentang ukuran sebesar 0% 25% yang dimana cenderung diakibatkan oleh asal pendapatan daerah serta alasan beban, biaya, dan gaji khusus provinsi belum membentuk aliran pendapatan daerah, sehingga masih belum bisa diandalkan, karena pula basis bea/permintaan di setiap kabupaten masih rendah. Dalam penelitiannya (Arispen & Rahmi, 2021) hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat manfaat kegiatan di daerah Aceh. Pemerintah Aceh tidak bisa bergantung pada pengeluaran provinsi dan memaksakan diri sebagai sumber dukungan desentralisasi.

Rasio Ketergantungan

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2018	Rp12.065.901.692.555,00	Rp14.427.783.075.798,60	8	Sangat Tinggi
2019	Rp13.049.675.124.487,00	Rp15.752.800.901.652,10	8	Sangat Tinggi
2020	Rp11.826.017.687.067,00	Rp14.439.920.557.021,10	8	Sangat Tinggi
2021	Rp11.431.169.265.498,00	Rp13.948.388.273.436,10	8	Sangat Tinggi
2022	Rp10.775.168.990.686,00	Rp13.713.584.703.595,90	7	Sangat Tinggi

Berdasarkan gambaran dan perkiraan di atas, maka dapat pula dikatakan bahwa proporsi ketergantungan moneter teritorial masyarakat lokal dan perkotaan di wilayah Aceh selama beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori sangat tinggi, karena masih berada pada angka 75% hingga 100. persen, dan hal ini terjadi karena besarnya proporsi pembayaran pertama. Sehingga secara keseluruhan tingkat pendapatan asli daerah tetap menggerogoti kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam APBD terbatas dan masih bergantung pada transfer pusat. Wajar saja, hal ini juga bisa terjadi karena pemerintah daerah bergantung pada transfer dana pusat. Bagaimanapun, batas nilai tukar pemerintah pusat masih kurang (Basyiruddin Nur, 2020).

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Efektifitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas PAD	Keterangan
2018	Rp2.359.385.393.645,65	Rp2.324.662.431.200,00	101%	Sangat Efektif
2019	Rp2.698.912.471.144,15	Rp2.589.284.044.683,00	104%	Sangat Efektif
2020	Rp2.570.775.877.183,15	Rp2.184.607.197.048,00	118%	Sangat Efektif
2021	Rp2.505.887.909.031,12	Rp2.401.682.455.965,00	104%	Sangat Efektif
2022	Rp2.917.145.003.051,96	Rp2.572.750.100.699,00	113%	Sangat Efektif

Tabel 4.8 di atas menyajikan perhitungan anggaran PAD LRA Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh relative stabil dari tahun sebelumnya, karena dari Rasio Efektivitas PAD yang mencapai skala lebih dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berhasil mengupayakan agar penerimaan PAD tercapai dan mencapai skala sangat efektif. Penerimaan PAD yang mencapai target dan efektif dikarenakan Jumlah uang yang dikumpulkan oleh sektor pajak dan retribusi daerah lebih besar dari perkiraan serta dapat selalu mempertahankan dan memaksimalkan keefektivitasan PAD Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh.

Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kapasitas masyarakat untuk memungut retribusi dan pajak atas aset lokal agar dapat membiayai operasi pemerintah, pertumbuhan, dan kegiatan amal secara mandiri dikenal sebagai otonomi moneter daerah, atau KKD. Metrik utama yang digunakan untuk menilai otonomi daerah adalah PAD, yang ditampilkan sesuai dengan kapasitas PAD. Berbeda pada penerimaan daerah ketika dari pihak lain, seperti besarnya kebebasan moneter hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan menunjukkan keadaan keuangan daerah., baik melalui pinjaman maupun dukungan dari tingkat nasional pada masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Aceh menunjukkan bahwa pendapatan lokal masih belum dapat diandalkan karena kabupaten belum melakukan efisiensi sumber pendapatan daerahnya, demikian pula karena basis pengeluaran/permintaan masih rendah. masing- masing wilayah provinsi.

Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena, kemampuan keuangan provinsi untuk mendukung pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD, masih sedikit bergantung pada pergerakan dan dana pusat tentunya hal ini juga dapat terjadi karena beberapa pemerintah daerah yang masih bergantung pada transfer dana pusat, namun kapasitas transfer pemerintah pusat yang tidak mencukupi. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi karena daerah memiliki lebih banyak kontrol atas sumber daya dan kebijakan fiskalnya. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi regional.

KESIMPULAN

Mengingat dampak estimasi dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan Strategi Pemeriksaan Pola, Proporsi Kewajiban Unik Pay Provinsi, Tingkat Proporsi Desentralisasi Moneter, Proporsi Otonomi Moneter Daerah, Proporsi Ketergantungan dan Proporsi Kecukupan Bantalan, maka kebijakan moneter Pameran Rezim/Pemerintah Daerah di Daerah Aceh bisa dibilang masih buruk sejak pindah bayar aturan aktual penerimaan pendapatan tahun 2018-2022. Karena belum optimalnya sumber pendapatan daerah dan masih cukup menurunnya basis pajak atau retribusi pada suatu daerah, tentunya menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh, pendapatan awal kabupaten dan kota masih tidak menentu. Hal ini tentu saja berdampak pada ekspansi perekonomian karena Upaya pertumbuhan APBD yang direncanakan sebagian besar bergantung pada dana transmisi federal karena terbatasnya keuangan daerah. Tentu saja hal ini juga dapat terjadi karena negara-negara lokal bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat, namun kemampuan mereka tidak memiliki fokus pada pergerakan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arispen, a., & rahmi, d. (2020). Pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi aceh tahun 2008-2020. *Journal riset ilmu ekonomi*, 76-77.
- Marini, y. (2017). Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kota banda aceh tahun 2012-2015. *Jurnal humaniora*, 1 (2), 61-70, 62.
- Royda, & riana, d. (2019). *Akuntansi dan manajemen vol.14, no.2, 2019*. Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan, 50-62.
- Sari, d. L., sari, c. P., anwar, k., & usman, u. (2022). Pengaruh tingkat inflasi, nilai ekspor komoditas kelapa sawit dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi aceh. *Jurnal aplikasi ilmu ekonomi*, 1.

Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8-22.

Sirestu, a. P. (2023). Analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (studi kasus pada kabupaten sumbawa provinsi nusa tenggara barat tahun anggaran 2011-2022). *Ipdn*, 11-13.